

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muhajir (A02206015)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 28 Juli 2010

Pembimbing



Drs. Ahmad Nur Fuad MA.
NIP. 196411111993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI



Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus
pada Tanggal 29 Juli 2010

Ketua atau pembimbing : Drs. Ahmad Nur Fuad MA. (.....)

Penguji I : Drs. M. Ridwan M. Ag (.....)

Penguji II : Drs. Abdul Aziz Medan M. Ag (.....)

Sekretaris : Dwi Susanto M. A. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel



Dr. Kharisudin Aqib M. Ag
NIP.1968071719930310007

ABSTRACT

Muhajir, Muhammad. Biography KH. Robach Ma `Shum.

This thesis entitled Biography KH. Ma `Shum Robach has three research focus, namely: How is life history Robach Ma `sum, What role Robach Society Ma `sum in Gresik, How Robach policies Ma `sum when he became Regent of Gresik.

Robach Shum Ma `shum umara well as scholars, have a role in society, among others: First, in the field of religion as religious leaders, educators, preachers and leaders as well as a religious and civic organizations. Second, in the field of education, namely Ma `Shum Robach as a Muslim intellectual figures and movements. Third, in the field of politik, Robach Ma `Shum well as religious leaders and civic organizations and became the Regent of Gresik.

This study used a branch of social sciences, including Sociology of Science, and Political Science. For that purpose a theoretical framework used is the theory of continuity and change, which means researching the existence of continuity and change when Robach Ma `Shum became Regent of Gresik. Therefore, researchers using the method of historical research methodology as in the book History of Helius Sjamsudin works, namely: Heuristic (collecting sources), Criticism (External and Internal), Interpretation and Historiography or explanation.

From these studies we concluded that there is continuity when Robach Ma `Shum became Regent of Gresik, one of which involves the application of policies Robach Ma `Shum, are more changes to its development priorities. Was among the factors is the application of these policies can not be separated from the figure of the leader, namely KH. Robach Ma `Shum who have a background from the boarding schools which are faced with a government bureaucracy which is basically different from that in pembangunanya priorities prioritize education.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Pendekatan dan Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II Riwayat Hidup KH. Robach Ma`shum	
A. Semasa Kecil Sampai Kuliah	12
B. Paradigma Politik KH. Robach Ma`shum.....	16

BAB IV KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ROBACH MA`SHUM

A. Visi-misi Pembangunan Pemerintahan Robach Ma`shum	56
B. Prioritas Pembangunan Robach Ma`shum	62
1. Bidang Pendidikan	65
2. Bidang Agama dan Kebudayaan	67
3. prioritas umum pembangunan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Keterbatasan Studi	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



I. Latar Belakang Masalah

Biografi adalah suatu alat pengumpul data untuk mengetahui riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain.¹ Robach Ma`sum lahir di sebuah desa yakni Desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik bertepatan pada Tanggal 15 Ramadhan 1367 H atau 13 Juli 1948 M. Salah satu hal yang menarik dari sosok Robbach Ma`sum adalah latar belakangnya yang berasal dari lingkungan pondok pesantren. Robbach Ma`sum merupakan putra seorang kiai. Dia tumbuh di lingkungan pesantren dan dibesarkan dengan kultur atau budaya NU (Nahdlatul Ulama'). Pengabdianya di *Jam`iyyah* NU (Nahdlatul Ulama') sudah tidak bisa diragukan lagi. Terakhir sebelum berkiprah di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Robbach Ma`sum merupakan Ketua Tanfidziyah PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama') Kabupaten Gresik Tahun 1991–2000 dan Bupati Gresik selama dua periode yakni pada Tahun 2000–2005 dan 2005–2010.²

Dengan latar belakang Robbach Ma`sum yang dikenal sebagai salah satu tokoh ulama di Gresik. Tokoh pemimpin agama Islam ini kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih di kenal dengan sebutan “kiai”. Disini menjadi menarik ketika Robbach Ma`sum mendapat

¹ Syiham Al Ahmadi, www.syiham.co.cc/2010/03/pengertian-biografi.html

² Subali, “*Biografi. KH. Robbach Ma`sum*”, *Dari Pesantren ke Pendopo* (Gresik: Ihyaul Ulum Publisher, 2004), ix.

amanah sebagai pemimpin pemerintahan, sebagai Bupati Gresik. Artinya, dia disamping sebagai ulama juga menjadi *Umara`* (Pemimpin Pemerintahan).

Pada pemilu Tahun 1999 dianggap pemilu paling demokratis dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya yang pernah digelar pada masa Orde Baru. Pada pemilu itu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) secara nasional menempati urutan ketiga setelah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Golkar (Golongan Karya). Presentase suara PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) secara nasional mencapai angka 12,6 %. Khusus di Propinsi Jawa Timur PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) berhasil memenangkan pemilu dengan presentase suara mencapai 35,43 %.³ Kemenangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Jawa Timur ini kebanyakan ditopang di daerah-daerah basis *Nahdliyin*. Di Kabupaten Gresik misalnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menang cukup meyakinkan dengan presentase suara mencapai 44,43 %.

Berbekal kemenangan tersebut PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Kabupaten Gresik berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) paling banyak, yakni 18 orang. Kemenangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Kabupaten Gresik ini ternyata juga membawa hikmah lain. Pada pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah Tahun 2000 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Gresik mampu mengantarkan salah satu kader terbaiknya menduduki jabatan Bupati Gresik periode 2000-2005. Kader tersebut adalah Robbach Ma`sum. Robbach Ma`sum merupakan Ketua Dewan

³ Choirul Anam, *2 Tahun PKB Jawa Timur*. (Surabaya: DPW PKB Jawa Timur, 2000), 15.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Robbach Ma`sum?
2. Bagaimana peran Robbach Ma`sum dalam masyarakat Gresik?
3. Bagaimana kebijakan-kebijakan Robbach Ma`sum ketika menjadi Bupati Gresik selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010)?

III. Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mengetahui gambaran secara umum tentang jenjang karir Robbach Ma`sum dan peran dan kedudukannya dalam masyarakat, dan tujuan khususnya yang ingin dicapai adalah :

- 1 Untuk mengetahui secara objektif tentang riwayat hidup Robbach Ma`sum.
- 2 Untuk menjelaskan peran Robbach Ma`sum dalam masyarakat Gresik.
- 3 Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan Robbach Ma`sum ketika menjadi Bupati Gresik.

IV. MANFAAT PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat beberapa manfaat penelitian, diantaranya adalah :

1. Untuk memperkaya khazanah masyarakat agar menjadi bacaan yang berguna bagi masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui tentang riwayat hidup serta peran Robbakh Ma`sum ketika menjadi Bupati Gresik.
2. Hasil studi ini dapat memberikan Sumbangan karya ilmiah, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang sosial.
3. Bagi pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, untuk dimanfaatkan sebagai sumber Informasi dalam penulisan ilmiah.
4. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini sebagai gambaran atau informasi tentang perannya dalam masyarakat Gresik, supaya dapat dijadikan bahan refleksi kepada generasi muda.

V. Pendekatan dan Kerangka Teori

Pendekatan yang digunakan dalam Skripsi ini, yang berjudul “biografi KH. Robach Ma`sum”, penulis menggunakan pendekatan historis. Dalam hal ini penulis berusaha mengungkapkan bagaimana sejarah riwayat hidup Robach Ma`sum serta perannya baik dalam bidang politik, sosial, agama maupun pendidikan.

Dalam studi sejarah ini, penulis berusaha menggunakan perspektif teoritis sebagai kerangka analisis terhadap fenomena-fenomena sejarah yang dikaji. Penggunaan disiplin keilmuan yang lain dalam studi ini seperti politik dan sosiologi sangat penting dijadikan sebagai analisis yang menjelaskan riwayat hidup, peran serta kebijakan-kebijakan Robach

Ma'sum ketika menjabat sebagai Bupati Gresik, sehingga peristiwa sejarah dapat dieksplorasi secara kritis dan mendalam. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *change in continuity* yakni suatu perubahan yang masih berkelanjutan yang di kemukakan oleh Oswald Spengler.⁵

Skripsi ini menggunakan bantuan dari beberapa teori untuk menginterpretasikan sumber-sumber yang di dapat, antara lain:

- a Kerangka analisis yang dikembangkan sesuai dengan pendekatan multidimensional, dengan demikian konsep-konsep ilmu sosiologi. Berangkat dari teori dan pemikiran Max Weber bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek keagamaan berasal dari para pemimpinnya.⁶
- b Pendekatan ilmu politik digunakan dalam penelitian ini. Ilmu politik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkonsentrasi pada negara, mencoba memahami dan melengkapi negara, esensi dalam bentuk yang beragam atau manifestasi dari pengembangan, sehingga ruang lingkup politik terkonsentrasi pada negara atau pemerintahan. Kajian ilmiah pada sejarah politik berarti harus mempelajari hakikat dan tujuan sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola individu atau kelompok yang membantu bagaimana sistem itu berfungsi, serta pengembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang termasuk di dalamnya meliputi administrasi.

⁵ Bugiono dan P.K. Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 83.

⁶ Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren* (Jakarta; Pustaka LP3ES, 1999), 236.

VI. Penelitian Terdahulu

Mengenai tinjauan penelitian terdahulu, Sejauh ini penelitian yang pernah dilakukan tentang KH Robach Ma`sum antara lain:

- Buku yaitu berjudul “*Biografi KH. Robbach Ma`sum, Dari Pesantren ke Pendopo Kabupaten*” (Gresik: Ihyaul Ulun Publisher. 2004). Penulis Subali alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Progam Studi Antropologi, Universitas Airlangga Surabaya, lulus Tahun 1995. Dalam buku ini, menjelaskan dan lebih menekankan tentang riwayat hidup KH. Robach Ma`sum.
- Buku yang berjudul “*Di Bawah Payung Sang Kyai (Gresik Menuju learning and Culture City)*”, Sebuah Refleksi Pemikiran Politik, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan KH. Robbach Ma`sum” dengan pengarang Ahmad Nurul Huda. Dalam buku ini menjelaskan tentang pemikiran Robach Ma`sum dalam bidang Politik, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

VIII. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian sejarah membahas tentang pemilihan topik, pengumpulan data (Heuristik), kritik, sampai pada penyajian hasil penelitian (Historiografi). Dengan demikian metode sejarah sebagaimana disebutkan diatas adalah seperangkat aturan yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, dan dinilai secara kritis dan menyajikan sintesa (paduan dari berbagai pengertian atau hal supaya semuanya

merupakan kesatuan yang selaras)⁷ dari hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan penerapan metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Tema Skripsi ini “*Biografi KH. Robbach Ma`sum*”, Alasan memilih tema ini karena:

- a) Pemimpin biasanya merupakan elemen yang berasal dari kalangan politik sehingga Robbach Ma`sum ketika menjadi Kepala Daerah (Bupati) Gresik sangat menarik untuk dikaji, terutama dalam perjalanan dia untuk menjadi Bupati selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) yang mana dia juga merupakan salah satu Ulama di Kabupaten Gresik.
- b) Rasa ketertarikan penulis terhadap Robbach Ma`sum sebagai salah satu “publik figur” (minimal di Kabupaten Gresik), saya yakin selama ini masih banyak yang penasaran dengan sosok Robbach Ma`sum.

2. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan sumber yaitu suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menyimpulkan sumber-sumber, data-data, atau jejak sejarah. Sejarah tanpa sumber maka tidak bisa bicara.⁸ Sumber sejarah adalah segala

⁷ Ananda Susanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Duta Media, 2000), 235.

⁸ Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah I* (Laporan Penelitian, 2005), 16.

sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu.⁹

a. Sumber Primer, diantaranya adalah :

- 1) Sumber benda (visual) seperti foto.
- 2) Sumber Lisan (*Oral History*) dari tokohnya sendiri yakni Robach Ma'sum dan orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan Robach Ma'sum seperti keluarganya.

b. Sumber Sekunder, diantaranya dari buku-buku atau referensi yang ada keterkaitan dengan penulisan skripsi.¹⁰

3. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber.¹¹ Dalam hal ini penulis mencoba memadukan hasil *interview* (wawancara) dengan sumber tertulis bahwa di situ belum ditemukan kerancuan yakni sumber-sumbernya dapat dipastikan keabsahannya. Kritik Sumber dilakukan terhadap sumber-sumber pertama, kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu.

Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan *kritik eksternal* dan *kritik Internal*. *Kritik eksternal* adalah proses untuk melihat apakah sumber yang

⁹ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), 95.

¹⁰ Bugiono dan Poerwantana P.K. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 23.

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), 70.

didapatkan autentik ataukah tidak, sedangkan *kritik Internal* adalah upaya yang dilakukan untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup layak atau tidak.¹²

4. Interpretasi atau Penafsiran

Interpretasi atau Penafsiran, adalah suatu upaya untuk melihat kembali sumber-sumber yang didapatkan, apakah sumber-sumber yang didapatkan dan yang telah teruji keabsahannya, maka peneliti memberikan penafsiran terhadap sumber yang telah didapatkan.

Dalam hal ini ada dua metode yang digunakan yaitu analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatakan.¹³ Setelah data terkumpul dan dibandingkan lalu disimpulkan untuk ditafsirkan sehingga dapat diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masyarakat yang dibahas.

5. Historiografi

Historiografi disini menyusun atau merekonstruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sumber-sumber dalam bentuk tertulis.¹⁴ Sebagai tahap terakhir dalam metode sejarah, historiografi adalah penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan layaknya laporan penelitian ilmiah, penulis mencoba menuangkan penelitian sejarah ke dalam satu karya yang berupa skripsi.

¹² Ibid., 130.

¹³ Lilik Zulaicha, *Metodologi Penelitian Sejarah 1*, 16.

¹³ Lilik Zulaicha, *Metodologi Penelitian Sejarah 1*, 17.

VIII. Sistematika bahasan

Hasil penulisan ini ditulis dalam V bab, dan masing-masing bab dibahas ke dalam beberapa sub bab, secara sistematis sebagai berikut :

Bab I : Membahas tentang pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Menjelaskan riwayat hidup Robbakh Ma`sum sebelum berkiprah dalam politik.

Bab III : Menjelaskan peran Robbakh Ma`sum dalam masyarakat Gresik.

Bab IV : Menjelaskan karir (kebijakan-kebijakan) Robbakh Ma`sum ketika menjadi bupati Gresik selama dua periode (2000-2005 dan 2005-2010).

Bab V : Penutup, berisi Kesimpulan dari penulis skripsi, Saran dan Kritik.

Adapun kenapa sekarang nama dia lebih populer di panggil “Robach Ma`sum” tentu ini juga tidak lepas dari proses. “Ma`sum” tidak lain adalah nama ayahnya, tidak dia sendiri saja yang memperoleh gelar tambahan “Ma`sum” tetapi semua saudara-saudaranya juga memperoleh gelar tersebut.

Makna pemberian nama tambahan ini adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap orang tua. Ayahnya adalah seorang ulama bernama KH. Ma`sum Sofyan. Sedangkan ibunya bernama Nyai Hj. Masyrifah. KH. Ma`sum Sofyan putra dari Mbah Sofyan dan Mbah Nyai Amnah. Sedangkan ibunya Nyai Hj, Masyrifah anak dari Mbah Haji Rusydi dan Mbah Nyai Masyfu`ah. Jika ditarik garis keturunan ke atas maka silsilah keluarga Robach Ma`sum cukup panjang. KH. Ma`sum Sofyan mempunyai 13 anak, berikut secara berurutan nama-nama anaknya tersebut:

1. Machfud
2. Makmun
3. KH. Machfud Ma`sum
4. Sakinah
5. KH. Abdullah Afif Ma`sum
6. KH. Robach Ma`sum
7. Ahmad Mudassir
8. KH. Sa`dan Maftuh
9. Hj. Sakinah Ma`sum

Sebagaimana saudara-saudaranya, dia pun diarahkan tetap pada jalur Sekolah Agama. Akhirnya diputuskan dia ikut tes masuk di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya. Saat pengumuman tes nama dia lulus dan diterima di Fakultas Ushuluddin pada Tahun 1964. Selama kuliah di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel dia “kos” di Wonokromo yang lokasinya tidak jauh dari kampus. Hanya pada tahun-tahun berikutnya dia lebih sering pulang karena mengajar di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Karena kesibukan dia inilah dia harus bolak-balik Surabaya - Gresik.

Robach Ma`sum cukup lama kuliahnya, sekitar 9 tahun-an dia menempuh studi di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel. Disamping kuliah dia sibuk mengajar, aktif di organisasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Robach Ma`sum baru lulus dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel pada tahun 1975.¹⁹

Di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya organisasi intra maupun ekstra kampus hampir semua dia ikuti. Di organisasi intra kampus, dia pernah menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (1967 - 1970).

Sementara di ekstra kampus dia aktif di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dia pernah menjadi ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Fakultas Ushuluddin (1969-1971).²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Machfud Ma`sum, 22 Juni 2010, di Dukun Gresik

²⁰ Wawancara dengan Robach Ma`sum 23 juni 2010, di Kantor Bupati Gresik.

dermawan dan do`a dari *mustadlafin* “orang-orang yang lemah”). Mereka identik berkarakter penerus kenabian.²¹

Jika menggunakan bahasa–bahasa kontekstual, maka kedudukan Ulama`, dengan kualitas keilmuannya dapat menjadi salah satu pilar dalam Negara dengan komitmen keagamaannya, Ulama` senantiasa menjadi *uswatun hasanah* (contoh keteladanan) bagi umat dengan mengorbankan semangat *amar ma`ruf nahi munkar*. Ulama` berusaha menyempurnakan akhlak menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Kepemimpinan yang mengambil semangat Ulama` dan nilai-nilai moral sebagai muaranya, akan mampu mengantarkan keadaan masyarakat pada kondisi budaya politik santun, tanpa berupaya “mengibiri” kemampuan bawaan masyarakat, manusia makhluk politik. Politisi santun, istilah yang lebih mudah dipakai bagi mereka yang menggunakan spirit Ulama` atau semangat kerohanian sebagai landasan moralitas politik. Inilah kemudian yang seharusnya dikembangkan menjadi bentuk–bentuk “madzhab” atau pemikiran moral politik (filsafat politik), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai semangat dalam dunia politik dan kekuasaan.²²

Memang sangat sulit untuk menentukan batasan–batasan apakah sebuah perilaku politik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral masyarakat atau tidak, namun tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa perilaku politik seseorang telah

²¹ M. Rusli, Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 20.

²² Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 45.

menodai kesepakatan serta tata cara yang telah dibangun bersama, yang kemudian menimbulkan keresahan–keresahan dalam masyarakat dengan “trik-triknya” yang menodai aturan, menjadikan tersebar fitnah–memfitnah, pertikaian, serta sasana adu domba di tengah–tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi melihat sisi manfaat dari proses politik yang sedang berjalan. Untuk menilai hal itu, cukup realitas yang terjadi dalam suatu masyarakat sebagai kumpulan data akuratnya, apakah perilaku–perilaku politik tersebut mampu membawa kedamaian bagi masyarakat atau justru politik yang membawa bencana.

Semangat ulama` disini, tidak harus dihadirkan oleh mereka yang berasal dari kalangan agama, sebab sifatnya lebih mengedepankan semangat kerohanian dengan perangkat–perangkatnya, akal, hati nurani, serta kejujuran. Salah satu tujuannya adalah menjadikan politik dan kekuasaan sebagai pemelihara alam semesta yang terlegitimasi, baik secara vertikal atau horisontal. Demikian pula dalam konteks menjalankan kekuasaan, maka semangat perjuangan ulama`, akan mampu menghindarkan para penguasa dari keserakahan, kesewenang–wenangan, dan ketidak-konsistenan.²³

2. Berpolitik Untuk *Rahmatan Lil `Alamin*

Rahmatan lil `alamin atau kemamfaatan universal, merupakan substansi dan pemikiran atau dalam kajian politisi NU (Nahdlatul Ulama`), lebih sering disebut sebagai kultur politik NU (Nahdlatul Ulama`).²⁴ Pada konteks ini, Robach Ma`sum mempunyai

²³ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), 80.

²⁴ *Ibid*, 84.

menjauhkan kerusakan hidup. Bukankah dalam al-Qur`an, telah diterangkan bahwa faktor perusak alam terbesar adalah perilaku manusia sendiri.

Konsep ini juga mempunyai tingkat relevansi pemikiran teologis tinggi, jika disinergikan dengan prasarat–prasarat politik kalangan syafi`iyah, yang mengatakan bahwa politik harus sesuai dengan syari`at Islam. Yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan umum.²⁷ Prinsip–prinsip syariat antara lain meliputi;

- a. Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama.
- b. Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawala untuk kepentingan umat.
- c. Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Memelihara harta kekayaan dengan mengembangkan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampui batas maksimal dan mengurangi batas minimal.
- e. Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani.

Hanya saja, bangunan pemikiran politik semacam ini juga harus didasarkan pada pola pikir yang egalitarian, anggapan dan kesadaran bahwa semua orang sederajat dalam kehidupan masyarakat. Kesamaan dalam segala hal, kesamaan tentang keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, kendati mereka definisikan berbeda dengan kita, kesamaan dalam keinginan untuk kesejahteraan dan kemakmuran, keamanan, keadilan dan penghargaan diri. Oleh karena itu, politik harus didasarkan pada kontruksi–kontruksi

²⁷ Ibid, 70.

Konsekuensinya, adalah mengintergralkan konsep-konsep ubudiyah agama dalam politik, yang terletak pada sisi tujuan dan cara tempuh. Perbuatan politik akan dinilai sebagai perbuatan agama atau ibadah, ketika ia dilahirkan berdasarkan muatan-muatan etika luhur. Demikian pula kebalikannya, perbuatan agama tidak masuk dalam kategori ibadah kalau ia dijalankan dengan melakukan pelanggaran etika. Disinilah sesungguhnya letak bahwa agama merupakan keseluruhan moralitas, individual, sosial, dan universal.

Konsekuensi selanjutnya adalah dimensi moralitas. Dan justru aspek kedua ini, banyak dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, sebab konsekuensi kedua ini merupakan titik aplikatif dari saripati agama; Islam adalah moral. Konsekuensi moral tentunya adanya kejujuran politik sebagai suatu proses, apakah proses politik itu telah memuat nilai sportifitas, atau kejujuran kekuasaan, yang dimaknai sebagai keterbukaan terhadap akses pengawasan dan evaluasi publik, lepas apakah melahirkan pujian atau kritik. Keteladanan politik dan keteladanan kekuasaan, dalam makna politik dan kekuasaan adalah cerminan dari pewarisan budaya politik antar generasi keterpercayaan politik dan keterpercayaan kekuasaan, ukuran kemampuan politik dan kekuasaan memegang amanah rakyat, keterbukaan politik dan keterbukaan kekuasaan terhadap rakyat (publik), serta kepekaan politik dan kepekaan kekuasaan, yang berkonotasi pada dimensi rasa, merasakan kehendak konsituen dan peka akan aspirasi rakyat.³⁰

³⁰ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, 96.

Integralisasi makna universalitas ibadah dalam area politik dan kekuasaan atau menimbulkan ikatan–ikatan transendental, keyakinan terhadap dua poros kekuasaan; kekuasaan untuk kebahagiaan rakyat dan kekuasaan demi pendekatan kepada Tuhan. Integralisasi tersebut juga dapat menimbulkan persepsi uluhiyah, yang mengkondisikan pelaku kekuasaan melihat pahala dan tidak menolak adanya kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari miliknya, sehingga menghindarkan sifat arogansi, antagonis, otoriter, serta absolutitas kewenangannya, sementara persepsi rububiyah dalam diri pelaku kekuasaan, untuk mempelajari wujud–wujud tampak yang dihasilkan dari kekuasaannya, apakah telah mencerminkan fungsinya sebagai pencegah terjadinya kejahatan dan kemungkaran.

Demikian pula persepsi rububiyah ini juga dapat dijadikan sebagai ibadah, dimana seharusnya kekuasaan bukan sekedar ritual sosial semata, dalam arti kekuasaan yang tidak bisa berbuat banyak untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya, kekuasaan sagnan atau sekedar simbol bahwa masyarakat masih mempunyai seorang penguasa.

4. Politik Adalah “*Thariqot*”

Akar pemikiran teologis Robach Ma`sum tentang politik kekuasaan ini disebut sebagai jargon politik, karena ini merupakan prinsip dasar perjalanan politik dan pemerintahan (kekuasaan) dia. Politik sebagai instrumen perjuangan dan kekuasaan adalah amanah atau mandat yang harus dipertanggung jawabkan. Bagi kalangan sekuler, kalimat ini mungkin dianggap sebuah bahasa *klise* yang cenderung menghegemoni atau bahkan sebuah tindakan “penyesatan” terhadap obyektifitas pemikiran rakyat akan realitas dan

grand policy dia. Pertimbangannya adalah kemaslahatan dalam menangkap makna kehidupan sosial dan semangat ketentuan moralitas.

Anggapan akan sangat berlawanan dengan berbagai konsep politik kekinian yang jauh lebih “fulgar” terhadap kekuasaan, dengan menganggap bahwa kekuasaan adalah ujung dari sebuah proses politik, disadari atau tidak. Baik perjalanan politik yang kemudian menjelma menjadi penguasa korup, penguasa bodoh (*fasik*), penguasa pembelot, dan penguasa sesat. Atau mungkin sebaliknya, ketika suatu yang dianggap sebagai “kejujuran” politik, yang diapresiasi melalui pandangan pragmatis, bahwa kekuasaan sebagai tujuan akhir, kemudian menghasilkan sebuah pemerintahan yang adil dan jujur. Persoalannya bukan terletak pada bagaimana membedakan sudut pandang politik dan kekuasaan, karena masing-masing mempunyai karakter dan keyakinan terhadap normatifitas berbeda, namun lebih kepada dimensi filosofis dari term politik dan kekuasaan yang digunakan.³²

Meletakkan politik sebagai jalan atau instrumen perjuangan lebih banyak dilahirkan dari kelompok atau masyarakat yang mempunyai latarbelakang perjuangan, yang tujuannya lebih dekat kepada masyarakat tertindas atau pinggiran. Sedangkan bagi kelompok yang menyakini konsep kekuasaan sebagai suatu kejujuran politik (apa adanya dan bagaimana senyatanya trik politik harus dilakukan), lebih didominasi oleh kalangan pragmatisme, yang

³² Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, 108.

tetap menyakini bahwa kekuasaan sangat penting didapatkan menata kehidupan yang lebih bagus.³³

Terdapat perbedaan yang sangat tipis, ketika kita mendudukan keduanya dalam konteks tujuan menata kehidupan masyarakat agar lebih bagus. Namun akan terlihat sangat mencolok, ketika hal ini akan ditarik pada bisa yang ditimbulkan dari proses dan hasilnya.

Lapisan masyarakat yang cenderung menciptakan “keteduhan dan kesantunan” politis, dibanding masyarakat yang memilih pola pikir kedua. Sebab unsur *bottom up* (pikiran atau usulan lapisan bawah), tanpa adanya intrik, dan pemalsuan kapasitas personal politisi atau calon penguasa, lebih dikedepankan. Dan tentu imbasnya adalah dihasilkannya sesuatu yang merupakan saripati kualitas personal dari komunitas manusia.

Sebaliknya, pola pikir kedua, akan banyak diwarnai oleh tindakan pembenaran, pemalsuan kapasitas, termasuk pemaksaan kemampuan, imbasnya, disamping terletak pada “panasnya” proses persaingan yang harus dilakukan secara transparan (akibat keyakinan terhadap esensial kejujuran politis), melibatkan tindakan penipuan besar-besaran terhadap masyarakat dan kualitas ambisi yang jelas akan berada diambang batasnya. Dan indikasi ini, terprediksi melalui ukuran ambisi yang dimiliki politisi, semakin tinggi kualitas ambisinya, maka semakin tampak kerakusannya terhadap kekuasaan. Sebab proses akhir politis yang ditujunya, adalah semata untuk kekuasaan.

³³ Ratu Alamsjah Perwiranegara, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1987), 32.



Untuk mendukung bahwa Robach Ma`sum lebih memilih pendekatan pertama, adalah pernyataan pertamanya, yang menyebutkan kekagetannya;

“Menjadi bupati tidak terlintas dalam hidup saya. Bahkan saya tidak pernah bermimpi sekalipun. Realitasnya, saya hanya digadang-gadang menjadi pendidik yang arif dan budiman”.³⁴

Disitu tampak sebuah bentuk prinsip yang “konsisten” bahwa, tindakan politik yang dilakukan, kapanpun hanya sebatas *thariqot* atau jalan serta instrumen menuju pada cita-cita memperjuangkan umat, bukan merupakan titik akhir, yang secara reflektif kemudian menghasilkan kekuasaan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan jalan yang santun dan bermoral.

Sebagaimana konsep Islam lainnya, seperti yang telah disinggung diatas, tentang pengintegrasian niatan perjuangan dalam dunia politik sebagai dimensi lain dari pelaksanaan ibadah. Pada tahap ini, sesungguhnya pemahaman Robach Ma`sum tentang Islam—sebagai totalitas ajaran, yang nilainya mampu menelusup dalam semua dimensi kehidupan, termasuk dalam persoalan politik dan kekuasaan—patut mendapatkan perhatian, setidaknya untuk menentukan wajah politik bagaimana, yang coba dihadirkan dia untuk mencapai kemapanan budaya politik masyarakat. Dimana budaya politik mantap ditandai perilaku politik yang mencerminkan secara utuh dan setara dengan derajat perkembangan

³⁴ Jawaban Robach Ma`sum ketika menjadi Bupati, lihat Subali, *Biografi Robach Ma`sum “dari pesantren menuju pendopo*, 151

kebudayaan yang telah dicapai masyarakat-nya.³⁵ Dan jika politik adalah instrumen untuk memperjuangkan umat dan masyarakat sangat mempengaruhi dalam pembentukan budaya politik yang mantap, maka perlu segera diwujudkan adanya suatu pendidikan politik bagi rakyat. Artinya bahwa peluang diberikan bagi rakyat banyak, lebih-lebih bagi para pelaku kebijakan, untuk mengetahui jalannya proses politik yang terjadi.

Dengan kata lain, proses pendidikan politik disini juga mengandung makna, yang kemudian akan mampu menarik dialog-dialog tentang perumusan makna demokrasi, musyawarah atau keadilan sosial. Hanya saja pendidikan politik tersebut tidak bisa berjalan efektif bila rakyat tidak dilibatkan secara substantif; terbuka bagi rakyat untuk melakukan pengkajian belajar, penilaian, menentukan sikap atau pendirian politiknya. Rakyat akan terdidik secara politis kalau kepada mereka disediakan akses yang makin lengkap atas segala kejadian dan latar belakang serta interaksi politik yang benar-benar terjadi untuk melahirkan sebuah kebijaksanaan atau keputusan pemerintah³⁶.

Bukankah pemikiran yang dilandasi nilai-nilai agama dan moralitasnya ini, cukup merespon cita-cita politik pemikiran madzhab lainnya. Bahkan nilai-nilai politik yang ditawarkan oleh Islam jauh lebih agung dan lebih demokrasi, dari Negara Amerika Serikat sekalipun. Karena agama memegang peranan penting dalam menyalakan kesadaran etis untuk menegakkan cita-cita demokrasi (jika demokrasi masih dipandang sebagai sebuah

³⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LKis, 1992), 25.

³⁶ Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esei – Esei Tentang Agama, Negara, dan Rakyat* (Jakarta: Mizan, cet.ii 1996), 110.

penulis dalam wilayah politisi lokal Gresik, masyarakat tersebut sangatlah sedikit menyebut bahwa mereka tidak ada.

5. Islam dan Demokrasi

Dunia politik dewasa ini, memang tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang demokrasi. Mengutip Rousseau, bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dan demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebab bila rakyat tunduk terhadap kekuasaan Negara, berarti ia tunduk kepada dirinya sendiri. Selain tataran etis, demokrasi juga mempunyai pijakan operasional, yang membutuhkan norma-norma yang bersandar pada landasan etis tersebut, untuk dipatuhi.³⁹

Namun terlalu menstandarkan kepada normatifitas demokrasi, tidak menutup kemungkinan akan menciptakan kebingungan baru bagi masyarakat, sebab antar Negara sering terjadi perbedaan bentuk aplikatif nilai-nilai yang diajukan oleh demokrasi. Intinya demokrasi sendiri membutuhkan penafsiran–penafsiran yang dihadirkan oleh masyarakat yang telah mempunyai konsep dasar sebelumnya.

Demikian penafsiran demokrasi di Indonesia, akan kaya dengan pengaruh–pengaruh agama, terutama agama Islam. Mengingat ada beberapa hal yang dipandang sebagai suatu kesamaan dalam satu tujuan. Khususnya ketika kita mendudukan nilai–nilai ajaran Islam dengan demokrasi dari sisi tujuannya, terletak pada bagaimana hak politik dijalankan, hak

³⁹ Ibid, 184.

melihat perilaku politik ini, dalam hal atau buruk adalah tentang masalah kekuasaan. Semakin kekuasaan diawasi, maka semakin baik orang dan semakin tidak diawasi maka semakin buruk suatu kekuasaan. Demokrasi melihat hal sama seperti yang dilihat agama, tetapi dalam perspektif yang sangat berbeda.

tataran konsep dan tujuan dakwah *amar ma`ruf – nahi munkar*, artinya secara keseluruhan kehidupan Robach Ma`sum sarat dengan warna cita-cita transformasi nilai, yaitu normatifitas dan religiusitas, sebagai salah satu bidang perjuangan atas nama agama yang sangat luas jangkauan serta lingkupnya.

Robach Ma`sum muncul sebagai tokoh masyarakat bukan sekedar warisan keluarganya, keturunan (genealogi) dari seorang bangsawan kerajaan Islam Pajang (Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya)⁴³, namun adalah sebuah kekuatan memimpin dan karakteristik sebagai pemimpin, yang mengalami masa pendewasaan dalam proses melalui dinamika keorganisasian yang cukup panjang.⁴⁴ Sementara penggunaan pendekatan kejiwaan, konsep manusia pemaaf dan berani meminta maaf, adalah jalan yang paling arif untuk mempertahankan kesatuan umat dan masyarakat.

2. Tokoh Gerakan dan Intelektual

Sejarah intelektual paling tidak bisa dipandang sebagai wacana, pergolakan bahkan pertempuran wacana yang terus mengalir dalam arus pemikiran. Dalam pergolakan wacana itu seorang intelektual tidak hanya berhadapan dengan struktur politik yang mendominasi daya hidup kebudayaan masyarakat atau yang melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial yang ada. Tetapi, mereka juga tidak

⁴² Ahmad Nurul Huda, *di Bawah Payung Sang Kiai* (Gresik: Ihyaul Ulum Plubiser, 2005), 35.

⁴³ Subali, *Biografi KH. Robbach Ma`sum, Dari Pesantren ke Pendopo* (Gresik: Ihyaul Ulum Publisier, 2004), 59.

jarang mesti berbenturan dengan struktur kesadaran masyarakat tempat berbagai rujukan, tindakan, dan pikiran.⁴⁵

Orientasi pergerakan dan dasar-dasar pemikiran dia juga banyak di ilhami dan hasil dari “gesekan” konsep dan paradigma rekonstruktif yang mengacu pada pola bangunan pemikiran gaya pergerakan mahasiswa dan dunia akademik (refleksi dari beliau sebagai dosen), dengan pola pikir pesantren sebagai “pengantar”nya, seperti pola pikir kritis–dialogis, kulturalis yang cenderung menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih contoh “memelihara yang lama, yang baik dan mencari yang baru yang lebih baik”, analogis (kesesuaian-kesesuaian) dinamis dengan menggunakan formulasi pemikiran dan gerakan yang bersifat komprehensif, menjunjung prioritas gerakan pada upaya memperjuangkan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Wal Jama`ah*, kendati hal tersebut tentunya akan semakin mengalami perkembangan dan kematangan.

Sementara totalitas gerakan didasarkan pada konsep normatifitas menjadi manusia seutuhnya atau dalam prespektif keagamaan, muslim sempurna (kamil), seperti konsep *attawassuth* (adil dan pilihan, yang menjadi tolak ukur manusia), dengan perwujudan karakter sifat wajar, sikap toleran, mau mengerti dengan pendirian pihak lain, konsep *i`tidal* (usaha terus menerus berlaku adil dan bersikap

⁴⁴ Djamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik*. (Bandung: zaman Wacana Mulia, 1998), 39.

⁴⁵ Ahmad Nurul Huda, *di Bawah Payung Sang Kiai*, 39.

Artinya bahwa tanpa suatu rancangan “yang disengaja”, bangunan politik praktis Robach Ma`sum mulai terbangun. Disini dasar-dasar perlawanan kelompok marginal kemudian dapat beliau ubah menjadi “satuan angka politik” yang pada waktunya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan mobilitas sosial (*social mobility power*), atau menggunakan istilah Kuntowijoyo mulailah diberlakukan pembacaan “Islam politik” dan hal ini menyebabkan pemerintah Orde Baru bersikap sangat hati-hati, kritis, bahkan cenderung mencurigai.⁴⁸

B. Perjalanan Robach Ma`sum Dalam Masyarakat

Salah satu yang amat diperluhkan dalam era sekarang ini dan juga sebenarnya dalam semua era pembangunan ialah akhlak atau moral.⁴⁹ Disini kita dibenarkan untuk mengharap kemungkinan peranan ajaran Islam secara lebih besar dan kuat. Selain timbul dari kesadaran keimanan seorang yang kebetulam beragama Islam, harapan kepada peranan Islam itu juga berdasarkan kenyataan sederhana, yaitu bahwa sebagian besar bangsa Indonesia umumnya dan di Gresik khususnya adalah umat Islam.

1. Bidang Agama

Dalam bidang agama, pemikiran-pemikiran dan pergerakan Robach Ma`sum lebih diwarnai oleh pengaruh dari lingkungan yakni Pondok Pesantren, kehidupan Robach Ma`sum, yang menyiratkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat sebuah

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan & MDM “Umat”, 1997), 45.

⁴⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 172.

garis lurus yang mengarah kepada tataran konsep dan tujuan dakwah *amar ma`ruf – nahi munkar*.

Robach Ma`sum menjadi salah salah ulama` di Gresik bukan sekedar warisan, keturunan (genealogi) namun adalah sebuah kekuatan memimpin dan karakteristik sebagai pemimpin, yang mengalami masa pendewasaan dalam proses melalui dinamika keorganisasian yang cukup panjang.⁵⁰ Salah satu peran Robach Ma`sum dalam masyarakat, adalah sebagai berikut:

a. Berjuang Pada Jam`iyyah Nahdlatul Ulama`

Dilihat dari latar belakang Robach Ma`sum yang berasal keluarga pesantren, yang notabene merupakan pesantren *salaf*. Sedangkan pesantren salaf ajarannya *ahlussunnah wal jama`ah* atau yang di sebut kaum *nadliyin*. Oleh karena itu, Robach Ma`sum sejak kecil telah mengenal ajaran Nahdlatul Ulama, lewat sentuhan langsung dari orang tuanya (KH. Ma`sum Sufyan) yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama` di masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Dukun khususnya dan Gresik umumnya.

“Soal kapan Robach Ma`sum bergabung ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama` secara formal itu tidak penting. Sebab yang terpenting sejak dini saya sudah belajar mengamalkan ajaran *ahlussunnah wal jama`ah*. Inilah hakekat sebenarnya kita

⁵⁰ Djamaluddin Malik, *Zaman Baru Islam “Pemikiran dan Aksi Politik”*, 39

menjadi orang Nahdlatul Ulama'.⁵¹ Dengan peranan dan pengabdian dia terhadap Nahdlatul Ulama', dia ditunjuk menjadi menjadi pengurus PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama') Kabupaten Gresik.

b. RMI (*Rabithah al-Ma`ahadi al-Islamiyah*)

Rabithah al-Ma`ahadi al-Islamiyah yang kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya “Perkumpulan atau Ikatan Pondok Pesantren”. Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan seluruh Pondok Pesantren yang tergabung dalam RMI (*Rabithah al-Ma`ahadi al-Islamiyah*).

Robach Ma`sum sendiri di RMI (*Rabithah al-Ma`ahadi al-Islamiyah*) pernah menjabat sebagai *katib* (sekretaris) cabang Gresik pada Tahun 1993-1996. di samping itu, Robach Ma`sum juga pernah menjabat sebagai *Musa`id* (Ketua Devisi) wilayah Jawa Timur pada Tahun 1996 – 2000. Di kedua jabatan tersebut dia dipilih secara aklamasi atau langsung.

Pesantren yang dalam perkembangannya kebanyakan berkembang atau berada di tengah-tengah masyarakat tradisional atau kelas bawah sehingga pesantren sangat identik dengan kaum tradisionalis atau pedesaan. Kebanyakan pesantren ini merupakan pesantren salaf. Dengan keadaan seperti itu maka tugas dari RMI (*Rabithah al-Ma`ahadi al-Islamiyah*) adalah bagaimana pesantren tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern ini.⁵²

⁵¹ Wawancara kepada KH. Robach Ma`sum, 23 Juni 2010, di Kantor Bupati Gresik.

⁵² Subali, *Biografi KH. Robbach Ma`sum, Dari Pesantren ke Pendopo*, 35.

Robach Ma`sum mungkin dapat dikategorikan sebagai hasil akhir dari sebuah pemikiran yang mempunyai akar dan arah yang sama, karena adanya kesamaan ideologi dan sudut pandang. Namun pengkategorian ini juga dapat ditolak jika kita menggunakan *term* bahwa antara pesantren dengan kampus, bagaimana pun mempunyai orientasi dan metodologi pergerakan berbeda.

Landasan filosofis pesantren adalah teologi dan religiusitas yang berposisi substansial dan bersifat keseluruhan, sedangkan perguruan tinggi cenderung kepada pragmatisme dan alienasi keduniaan sementara itu ia menempatkan teologi dan religiusitas pada posisi instrumental dan merupakan bagian saja, dan apapun intinya akar pemikiran Robach Ma`sum terhadap forum gerakan sangat didasarkan pada konsep normatifitas, kendati tidak menghilangkan gaya kritis-dialogisnya. Santunnya aksi, yang mengarah kepada normatifitas nalar pergerakan, yakni dari kesadaran normatif menuju pada kesadaran ilmiah, dari kesadaran teologis mengarah kepada kesadaran empiris.⁵⁵

a. Pendidik (Guru)

Kacang gak ninggal lanjaran, peribahasa jawa ini sangat lekat pada diri Robach Ma`sum. Maksudnya, jiwa ayahnya yang pendidik ternyata menurun pada Robach Ma`sum. Sejak duduk di bangku Tsanawiyah dia sudah diminta menjadi “asisten” mengajarnya ayahnya. Sekali waktu Robach Ma`sum jadi guru atau *ngulang ngaji*.

⁵⁵ Ahmad Nurul Huda, *Di Bawah Payung Sang Kiai*, 54.

Ketika Robach Ma`sum baru setahun kuliah di IAIN Sunan Ampel, tepatnya Tahun 1967, Pondok Pesantren Ihyaul Ulum secara resmi mengangkat dia sebagai guru. Sambil terus kuliah Robach Ma`sum mengajar di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum. Selain itu antara tahun 1967–1979 Robach Ma`sum juga diminta mengajar di Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh Sidayu-Gresik. Kondisi ini tentu mengharuskan Robach Ma`sum pandai-pandai membagi waktu dan tenaga.

Selain bekerja semasa mahasiswa Robach Ma`sum juga mulai aktif di berbagai organisasi, baik organisasi di kampus maupun organisasi kepemudaan di masyarakat. Robach Ma`sum sangat sibuk. Jadinya kuliah Robach Ma`sum terkatung-katung dan molor. Tahun 1975 Robach Ma`sum baru lulus dari IAIN Sunan Ampel. Total Robach Ma`sum membutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikan studi ini.⁵⁶ Selain di Ihyaul Ulum Robach Ma`sum juga sempat mengamalkan ilmu di beberapa sekolah luar. Ini semua dilakukan dia semata-mata untuk mengembangkan diri. Disamping itu, Robach Ma`sum juga memiliki waktu untuk melaksanakan mengajar selain di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Ayahnya (KH. Ma`sum Sofyan) turut mendorong keinginan mengajar di luar Ihyaul Ulum. Bahkan, Ayahnya punya kebiasaan “mengirim” anak-anaknya atau guru Ihyaul Ulum untuk diperbantukan di desa-desa yang membutuhkan.⁵⁷

⁵⁶ Subali, *Biografi KH. Robach Ma`sum, Dari Pesantren Ke Pendopo*, 66.

⁵⁷ Wawancara dengan Robach Ma`sum 23 Juni 2010, di Kantor Bupati Gresik

alasan “politis”, Robach Ma`sum dapat hukuman mutasi di tahun 1989 ke Sidoarjo. Karena saat itu Robach Ma`sum lagi semangat-semangatnya aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, dan tidak mau mendukung Golkar. Robach Ma`sum punya pilihan politik sendiri yang berseberangan dengan kehendak “penguasa” pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu dia mengundurkan diri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), karena tidak mau dimutasi ke Sidoarjo.⁵⁹

c. Sebagai Dosen

Setelah itu pada tahun 1975 dia menjadi Dosen di Fakultas Ushuluddin IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya. Selama menjadi Dosen di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya antara tahun 1976-1983 dia sempat mengajar di Fakultas Dakwah. Di Fakultas ini dia memegang mata kuliah Ilmu Tauhid. Tugas mengajar di dua Fakultas ini dia jalani semenjak Tahun 1980.

Sebenarnya status menjadi dosen cukup membanggakan, demikian pula orang tua turut bangga, sayangnya, dia tidak sempat mengajar di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) selamanya, demikian jabatan struktural juga di kampus tidak sempat dia raih. selama mengajar di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dia hanya berstatus dosen biasa dan pada tahun 1983 dia berhenti menjadi dosen. Disamping pernah mengajar di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya dia

⁵⁸ Subali, *Biografi Robach Ma`sum “Dari Pesantren ke Pendopo”*, 60.

⁵⁹ *Ibid*, 67.

juga mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Qomaruddin pada tahun 1988 yang dipercaya memegang mata kuliah Filsafat Islam dan Ilmu Kalam sampai sekarang.⁶⁰

2. Bidang Politik

Hakekatnya KH. Robach Ma`sum, mulai bersentuhan dengan area dunia politik praktis.⁶¹ Karena dalam berbagai aktifitas dakwah dan “forum”nya dia sering di persepsi sebagai sebuah figur pemberani dan “nekad”, yang sering melakukan aksi-aksi “konfrontatif”, terutama terhadap kebijakan-kebijakan pada masa jayanya penguasa Orde Baru. Meskipun demikian, anggapan atas aksi konfrontasi tersebut, sama sekali tidak menggunakan pendekatan-pendekatan rasional dialogis, merupakan salah satu bagian dari karakteristik manajemen konflik kekuasaan Orde Baru pada saat itu, dan hanya sebatas upaya penguasa untuk “mencitrakan” dia sebagai sosok fundamental yang perlu diwaspadai.

Artinya bahwa tanpa suatu rancangan “yang disengaja”, bangunan politik praktis Robach Ma`sum mulai terbangun, melalui sebuah kerangka konsep cukup memikat yang kebanyakan digunakan secara implisit oleh para “elit” agar (*personal leadership*), yaitu *frame* “memasuki hati nurani umat”. Disini dasar-dasar perlawanan kelompok marginal kemudian dapat dia ubah menjadi “satuan angka politik” yang pada

⁶⁰ Wawancara dengan Robach Ma`sum, 23 Juni 2010, di Kantor Bupati Gresik.

⁶¹ Yang dimaksud politik praktis adalah perbuatan politik yang langsung menuju kepada sasaran untuk mendapat kekuasaan atau bagian kekuasaan melalui kursi perwakilan. Lihat Abu Nahid, *Pemikiran KH. Achmad Shidiq*, 81.

waktunya dapat menjelma sebagai sebuah kekuatan mobilitas sosial (*social mobility power*), atau menggunakan istilah Kuntowijoyo mulailah diberlakukan pembacaan “Islam politik” dan hal ini menyebabkan pemerintah Orde Baru bersikap sangat hati-hati, kritis, bahkan cenderung mencurigai.⁶²

Sebenarnya yang cukup menarik dari pemaparan di atas adalah bahwa bangunan “teologi” tradisi dunia pesantren ternyata dapat membentuk dan memberikan kesan mendalam terhadap kemampuan adaptatif Robach Ma`sum dalam komunitas intelektual yang plural, yang apabila disusun dalam suatu *teori*, maka dasar nilai “teologi” tradisi pesantren ini akan membentuk beberapa landasan pemikiran, antara lain:⁶³

- a. Dalam perspektif pergerakan, maka nilai-nilai normatifitas adalah standar awal dan sekaligus tujuan akhir, semampu-mampunya, tanpa batas dan sekat-sekat tertentu.
- b. Bahwa sikap *adaptable* merupakan prasarat utama untuk melakukan rekonstruksi pemikiran melalui metode formulasi yang komprehensif, namun tetap mendasarkan diri pada perspektif al-Qur`an, al-Sunnah dan orientasi *cultural*.

⁶² Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, 50.

⁶³ Mahrus Irsyam. *Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan. 1984). 34.

menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab, untuk mencapai kemaslahatan bersama.

- 5) Berpolitik bagi NU (Nahdlatul Ulama`) harus dilakukan dengan moral, etika, dan budaya, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 6) Berpolitik bagi NU (Nahdlatul Ulama`) haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstiusional, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
- 7) Berpolitik bagi NU (Nahdlatul Ulama`) dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan *akhlaqul karimah* sebagai pengamalan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.
- 8) Berpolitik bagi NU (Nahdlatul Ulama`) dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan dan memecah belah persatuan.
- 9) Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU (Nahdlatul Ulama`), harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *tawadlu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan dilingkungan NU (Nahdlatul Ulama`).

Setelah sukses sebagai Ketua Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Tahun 1999 dan memenangkan pemilu, Robach Ma`sum diangkat menjadi Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cabang Gresik pada Tahun 2001-2000.

b. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik

Setelah pemilihan umum selesai dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik, selanjutnya pemilihan anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik. pada sidang pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik akhirnya Robach Ma`sum menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik. dalam proses pencalonan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik terdapat 4 kandidat antara lain: Ir. Bambang Suhartono, H. Anwar Sadat, dan Letkol Polisi Tatang Supriyatna dan KH. Robach Ma`sum.

Pemilihan tersebut dilakukan secara *voting* oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik dan hasilnya KH. Robach Ma`sum terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik periode 1999-2004 dengan perolehan suara 21 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik.

Pada Tanggal 23 September 1999, KH Robach Ma`sum dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik, agenda yang harus dilakukan ketika baru

menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik adalah persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik.⁶⁹

c. Sebagai Bupati Gresik (2000-2005 dan 2005-2010)

Dengan majunya Robach Ma`sum sebagai bupati yang mewakili kaum *nahdliyin* maka harapan besar diberikan kepada Robach Ma`sum untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat terutama masyarakat Gresik.

Ketika memasuki proses penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2000-2005 banyak nama yang muncul untuk mencolankan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati antara lain: Soewarso, Ir. Sambari Halim, Ir. Agus Abdul Manan dan HM. Mansyur. Pada Tanggal 19 Januari 2000 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik melaksanakan sidang paripurna untuk menyampaikan hasil penyaringan calon Bupati dan Wakil Bupati dari masing-masing fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik.

Ketika sidang di mulai Fraksi yang pertama mendapat giliran untuk menyampaikan hasilnya adalah Fraksi TNI dan Polri yang mengusulkan 3 pasangan, yakni: pertama, pasangan HM. Mansyur dan Ir. Sambari Halim. Kedua, Drs. KH Robach Ma`sum dan Ir. Sambari Halim. Ketiga, H. Soewarno dan Drs. H. Imam Thabroni.

Kemudian disusul Fraksi Gabungan yang mengusulkan 4 pasangan, antara lain: pertama, Ir, Sambari Halim dan Hariyadi. SE. kedua, Drs. H. Bianto dan Ir. Muslich

⁶⁹ Subali, *Biografi KH. Robach Ma`sum, Dari Pesantren Ke Pendopo*, 50.

Abduh. Ketiga, H. Wasiadji dan H. Hasan Chumaidi. Keempat, H. Soewarso dan Drs. Imam Thabroni.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan 2 calon. Yakni: pertama, Ir. Bambang Suhartono dan Ir. Sambari Halim. Kedua, Drs. Robach Ma`sum dan Ir. Sambari Halim.

Terakhir adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa yang mengusulkan 2 pasangan yakni pertama, Ir. Agus Abdul Manan dan Mas Martono. Kedua, Ir. Agus Abdul Manan dan HM. Mansyur.

Ketika penyampain nama-nama calon selesai, salah satu anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa melakukan interupsi atau tidak setuju terhadap penyampaian hasil dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yakni: Drs. H. As`ad Thoha, menurut dia bahwa pasangan yang di usung oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak aspiratif karena dalam penentuannya tidak melibatkan seluruh anggota dan hanya diikuti sebagian saja.

Akibat kejadian itu maka sidang ditunda selama 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam menentukan siapa yang menjadi calon Bupati. Setelah melakukan musyawarah maka muncul 2 pasangan yang diusung oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, yakni: pertama, pasangan Ir. Agus Abdul Manan dan Mas Martono. Kedua, Robach Ma`sum dan Ir. Sambari Halim.

Tanggal 22 dan 23 Januari 2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik melakukan sidang paripurna lagi untuk mendengar visi dan misi serta prioritas

yaitu “memperbaiki desa dan menata kota” yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

○ **Membangun Desa Menata (Ulang) Kota**

Bupati Gresik waktu itu. Singkat cerita Robach Ma`sum, begitu ia biasa dipanggil, mengintrodusir Membangun Desa Menata Kota pada saat mempresentasikan visinya dalam membangun Kabupaten Gresik. *Mbangun deso noto kutho* dengan Membangun Desa Menata Kota adalah dua jargon yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Bedanya hanya yang disebut pertama merupakan redaksi bahasa Jawa. Saya tidak mengetahui betul jargon mana yang lebih dulu muncul. Ibarat harus menjawab pertanyaan lebih dulu mana telur dengan ayam, penulis juga tidak mengetahui secara persis mana yang lebih dahulu ada, *Mbangun deso noto kutho* atau Membangun Desa Menata Kota.

Namun satu yang pasti, bahwa usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini, dimanapun daerahnya, sudah seharusnya bertolak dari akar filosofis Membangun Desa Menata Kota. Membangun desa berarti, akselerasi peningkatan seluruh aspek pengembang desa harus semakin ditingkatkan. Mulai dari struktur-infrastruktur, sarana dan prasarana, sampai dengan sumber daya manusianya. Perbaikan jalan desa, peningkatan daya saing *home industri*, pemberian modal berbunga rendah, menambah tempat-tempat hiburan (dalam arti positif), adalah bentuk-bentuk usaha konkrit yang dapat dicoba untuk

membangun desa. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia desa, lewat jalur pendidikan dan penguatan kepribadian.

Pendek kata, usaha membangun desa adalah upaya menjadikan desa semenarik dan menyenangkan kota. Pembangunan desa juga harus dapat mengarah kepada strategi menjadikan kader berkualitas yang ada memiliki loyalitas untuk tetap tinggal dan mengembangkan desanya. Hal ini juga akan menjadi preseden yang menarik bagi para kader desa yang menimba ilmu di luar daerah. Karena, kader-kader desa yang semacam inilah yang pengalamannya melihat pengembangan dan perkembangan daerah lain, sangat dibutuhkan sebagai referensi pengembangan desa asalnya. Sehingga desa yang bersangkutan tidak mengalami *brain drain* atau sulit berkembang karena sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki, hijrah ke daerah lain yang dianggap lebih bisa memberikan jaminan hidup. Sebaliknya, desa yang bersangkutan justru bisa merasakan manfaat dari kualitas dan loyalitas kadernya (*brain gain*).⁷¹

Sementara itu, pembangunan dan pengembangan kota sudah saatnya mengarah kepada upaya penataan kota. Hal ini dapat dipahami karena memang lanskap pembangunan perkotaan tidak bisa seluas dan semaksimal pembangunan desa. Karena sejatinya pembangunan daerah perkotaan sudah sangat maju jauh meninggalkan pembangunan desa. Meskipun upaya itu belum final, namun pembangunan sarana-prasarana dan struktur-infrastruktur di daerah perkotaan sudah relatif maksimal dibanding pedesaan. Sehingga, jargon *noto kutho* memang secara harfiah seharusnya berimplikasi pada upaya untuk

menjadikan kota lebih tertata rapi, bersih, bebas polusi, aman, tidak rawan banjir, tidak macet dan masing-masing fungsi memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakatnya.

Usaha ini penting, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pemerintah daerah maupun pemerintah kota yang kurang memperhatikan fungsi dan tata letak kota dalam menggenjot pembangunan daerahnya. Misalnya, di beberapa daerah, taman kota yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk ruang publik justru dijadikan pusat perbelanjaan. Ada juga kawasan yang seharusnya khusus untuk kawasan pendidikan tapi justru digunakan untuk Supermarket. Lebih parah lagi, ada lahan yang seharusnya untuk daerah resapan justru di atasnya dibangun Mal atau Villa Eksklusif. Jika pembangunan kota sudah seperti itu, maka wajar kalau kemudian banyak terjadi banjir, kemacetan dimana-mana dan udara segar kota sudah semakin sulit dicari. Oleh karena itu, tepat kirannya jika pembangunan kota diarahkan kepada upaya untuk menata dan menempatkan semua fungsi kota sesuai dengan proporsinya.

⁷¹ Ahmad Nurul Huda, *Di Bawah Payung Sang Kiai*, 75.

BAB IV

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ROBBACH MA`SUM

KETIKA MENJADI BUPATI GRESIK

A. Visi – Misi Pembangunan Pemerintahan KH. Robach Ma`sum

Hasil pemilu 1999 di Kabupaten Gresik berhasil mengakhiri dominasi orde baru dalam hal ini diwakili oleh Partai Golkar sebagai kendaraan politik orde baru saat itu. Yang mana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan kendaraan politik Robach Ma`sum merupakan kendaraan politik dia untuk menjadi Bupati Gresik berhasil menang dengan suara yang banyak yakni 44,43 %.

Oleh karena itu, Partai Kebangkitan Bangsa berhasil mengantarkan wakilnya untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 18 orang merupakan yang paling banyak diantara wakil partai-partai lainnya.

- **Visi-Misi Kabupaten Gresik**

- Visi :

“Terwujudnya masyarakat Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan sejahtera”.

- Misi :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia menuju kehidupan yang harmonis.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, produktif dan mandiri.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat disegala bidang kehidupan dalam suasana yang kondusif sesuai dengan hak dan kewajiban.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya taraf hidup.

Bahasa yang paling tepat dari penerjemahan visi dan misi kabupaten gresik, tentunya dalam skala prioritas atau yang menjadi titik tekan pembangunan yakni: pendidikan, kesehatan, dan agama-kebudayaan.

Dalam konteks berfikir ini, mungkin hanya dari kalangan intelektual atau yang mempunyai nalar kritis yang mampu menangkap makna strategis yang didapatkan dari ketiga prioritas pembangunan tersebut. Kebalikannya, tiga prioritas ini mungkin akan sulit diterima oleh kelompok-kelompok yang selalu berorientasi dalam pembangunan fisik (*infrastruktur development*). Meskipun pembangunan infrastruktur juga tidak bisa dielakkan sebagai bagian dari keseluruhan progam pembangunan, yang harus dapat dirasakan dan diperhatikan.⁷²

Apabila kita teliti lebih jauh, bahwa prioritas pembangunan pemerintahan KH. Robach Ma`sum, memang sangat diwarnai dengan karakteristik kepemimpinanya. Maka prioritas terhadap progam pembangunan di bidang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sejarah dedikasi Robach Ma`sum bahwa kekuatan ilmu

⁷² Misdianti dan R.G. Kertasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 20.

pengetahuan akan mampu menundukkan berbagai macam persoalan-persoalan baik yang berkaitan dengan kehidupan nyata, dan segala perkembangannya, atau persoalan-persoalan abstrak. Yang akan menjadi tumpuan pembangunan mental dan moral sehingga dapat dijadikan pondasi pembangunan dalam masyarakat. Intinya prioritas program pembangunan Robach Ma'sum lebih diarahkan kepada pondasi pembangunan, yakni pembangunan manusia seutuhnya.⁷³

Pembangunan pendidikan disini juga diarahkan dalam rangka membentuk masyarakat yang kaya sumber daya manusia yang maju dan mandiri. Kemajuan tanpa kemandirian akan membawa kelemahan, karena kemajuan tersebut dicapai dalam kondisi ketergantungan kepada pihak-pihak lain. Sementara kemandirian tanpa kemajuan juga cacat tersendiri, karena kemandirian model tersebut akan menciptakan ketertinggalan.

Sementara pembangunan agama, yang secara makro yang diarahkan untuk memperkuat keberadaan budaya. Pembangunan agama difungsikan sebagai sisi lain yang menyertai ilmu pengetahuan, membentuk komunitas yang mampu mensinergikan cita-cita pembangunan kebudayaan dan pembangunan peradaban manusia.

Lajunya peradaban manusia, yang tanpa dimbangi oleh kemajuan kebudayaannya, cenderung termotivasi oleh pandangan materialistik, sekularistik, kapitalistik, dan hedonistik. Juga banyak menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keresahan jiwa. Demikian juga sama bahayanya ketika kebudayaan harus berdiri sendiri, tanpa peran serta agama. Sebab akan terjadi suatu proses yang disebut persilangan budaya yang

⁷³ Ahmad Nurul Huda, *di Bawah Payung Sang Kiai* (Gresik: Ihyaul Ulum Publiser, 2005), 180.

menyebabkan akulturasi simetris, yaitu bahwa pengaruh Negara maju akan sangat dominant dan ilmu pengetahuan, teknologi akan membawa dampak pada corak kebudayaannya.⁷⁴

B. Prioritas Kebijakan Robach Ma`sum Ketika Menjadi Bupati Gresik

Naiknya KH. Robach Ma`sum, adalah naiknya seorang tokoh masyarakat dari kalangan sipil, yang santri ke tempat yang dianggap paling dominan (pemerintahan), dan merupakan konsekuensi dari sejarah perpolitikan di daerah khususnya di Gresik. Kepemimpinan Robach Ma`sum memang sangat diharapkan menjadi *rahmatan lil alamin*. Ini berarti dalam konteks pembangunan, masyarakat tidak menginginkan ada hitam putih, hijau biru, abangan santri, sipil militer, kuat lemah. Apalagi jika terjadi pola - pola kepemimpinan yang monarkhi bagi masyarakat.⁷⁵

Image dan keyakinan terhadap kepemimpinan Robach Ma`sum yang dinaikan berdasar antusias dan semangat rakyat, memang sangat wajar jika mereka menuntut timbal balik, berupa kebijakan-kebijakan serta kerja pembangunan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Berikut ini, kebijakan Robach Ma`sum terhadap masyarakat yakni: tiga prioritas pembangunan.⁷⁶ *pertama*; dalam bidang pendidikan, sebagai sebuah dimensi kehidupan masyarakat yang bersifat asasi. Kesan pendidikan mahal, pendidikan berpihak golongan

⁷⁴ Ibid, 182.

⁷⁵ Ibid, 189.

⁷⁶ Subali, *Biografi Robach Ma`sum "Dari Pesantren ke Pendopo"* ((Gresik: Ihyaul Ulum Publiser,2004)), 202

Kedekatan dia dengan dunia pendidikan merupakan poin pertama melihat realitas pendidikan di masyarakat apa adanya, termasuk kepedihan-kepedihan yang cukup lama diderita para guru. Hidup dalam pendidikan memang cukup rumit, namun jauh lebih sulit ketika dalam pendidikan dan perjuangannya dihadapkan pada ketidakpedulian masyarakat dan pemerintahannya.

Kedua; bidang kesehatan, selain bidang pendidikan kesehatan juga merupakan kebutuhan yang mencakup hajat hidup masyarakat. Tersedianya layanan kesehatan yang baik sudah barang tentu harapan semua masyarakat. Oleh karena itu, terkait masalah kesehatan Robach Ma`sum mencanangkan prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

Solusi untuk mengatasi masalah itu semua menurut Robach Ma`sum adalah dengan mengadakan pembenahan atau rehabilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan dan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat. Selain itu semua, yaitu penempatan tenaga kerja di bidang kesehatan diperbanyak agar lebih tanggap dalam melayani masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin juga diberikan fasilitas kesehatan gratis atau yang biasa dikenal dengan istilah JPKS (Jaminan Pelayanan Kesehatan).⁷⁸

Ketiga: bidang agama, agama juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang diwakili oleh Bupati memprioritaskan pembangunan di bidang ini. Pembangunan di bidang agama menurut Robach Ma`sum selaku Bupati Gresik mengatakan bahwa pembangunan di bidang agama sangat besar manfaatnya untuk menjadi landasan bagi pembangunan di bidang yang lain. Dengan agama

- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan
- i. Meningkatkan manajemen pendidikan dan kebudayaan
- j. Pembinaan pondok pesantren dan madrasah diniyah
- k. Pembinaan generasi muda dan olahraga
- l. Pengembangan sumber daya arkeologi
- m. Pembinaan anak usia dini.
- n. Pembinaan taman pendidikan al-Qur`an (TPA)
- o. Pengembangan kurikulum yang mencakup bidang kebudayaan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Tidak semua masalah umum dan isu-isu tentang program pembangunan diperhatikan oleh perumus kebijakan. Tidak jarang masalah-masalah umum dan isu-isu tersebut mendapat perhatian. Dan masalah-masalah umum serta isu-isu yang mendapat perhatian para perumus kebijakan inilah yang lazim disebut dengan agenda kebijakan.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut dan sebuah reaktif dari dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam pemerintahan Robach Ma'sum, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat sinergis dengan tujuan pembangunan tersebut, terutama kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang-bidang pendidikan.

Antara lain:

- 1) Optimalisasi Rancangan Anggaran Pembelajaran Daerah (RAPBD), anggaran bidang pendidikan.

- 2) Memperkuat dan memperluas jaringan pendidikan
- 3) Kerjasama dengan legislatif (mencari legitimasi konstitusional)
- 4) Memfasilitasi terbentuknya departemen pendidikan dan optimalisasi keneja komite sekolah
- 5) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi
- 6) Kerjasama dengan pondok pesantren
- 7) Kerja sama dengan tokoh masyarakat
- 8) Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 9) Kerjasama dengan dunia usaha dan industri
- 10) Kerjasama pendidikan dengan lembaga luar negeri

2. Bidang Agama dan Kebudayaan

Ada beberapa faktor pada pola pikir dan perilaku-perilaku masyarakat yang saling terkait, aplikasi pemikiran-pemikiran Robach Ma`sum dibalik kebijakan “kota budaya ” diantaranya yang berkenaan dengan system pendidikan, bagaimana lingkungan memberikan pengaruh, bentukkan sosial, adab-istiadat, kebudayaan masyarakat dalam makna makro.⁷⁹

Akan tetapi orientasi kebijakan-kebijakan Robach Ma`sum lebih menekankan pada dua bagian saja yaitu: membangun kualitas keberagaman dan kemajuan kebudayaan masyarakat. Aplikasi pemikiran-pemikiran Robach Ma`sum tentang kebijakan dia yakni “kota budaya”, yang mengarah pada peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya,

- 5. Kebijakan Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Tinggi.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan pelayanan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terutama sekolah menengah dan tinggi. Sasarannya adalah (a). meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau, dan (b). meningkatnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah.
- 6. Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Untuk Masyarakat.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan layanan pendidikan bagi warga masyarakat agar dapat memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya. Sasarannya adalah meningkatnya minat baca dan kualitas layanan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum daerah.
- 7. Kebijakan Meningkatkan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal guna mewujudkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja. Sasarannya adalah terciptanya sinkronisasi kebutuhan pembangunan yang ada dengan jenis pendidikan yang harus disiapkan.
- 8. Kebijakan Meningkatkan Partisipasi Pemuda serta Menumbuh-kembangkan Olahraga , Seni dan Budaya.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda serta menumbuh kembangkan olah raga prestasi, seni dan budaya. Sasarannya adalah (a). meningkatnya pemberdayaan pemuda sebagai

subyek pembangunan dan terwujudnya budaya olahraga dalam rangka peningkatan prestasi daerah, (b). Terwujudnya kelestarian seni budaya daerah dan khasanah sejarah serta nilai tradisional sebagai sumber nilai kearifan lokal yang merupakan modal dan mewujudkan jati diri masyarakat Gresik.

- 9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan upaya standarisasi sarana dan prasarana kesehatan. Sasarannya adalah Pengembangan segala upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.
- 10. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta meningkatkan kualitas lingkungan. Sasarannya adalah (a). terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. (b). Meningkatnya keberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.
- 11. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan.** Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan perbekalan kesehatan. Sasarannya adalah (a). Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan

Sasarannya adalah meningkatnya kompetensi SDM aparatur yang dilandasi oleh moral dan etika

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-4 : **Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan sesuai Hak dan Kewajiban**, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:⁸⁴

15. Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan Hak dan Kewajiban. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peluang bagi masyarakat berkontribusi dan melakukan kontrol social terhadap kebijakan pemerintah. Sasaran kebijakan ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

16. Kebijakan Memperkuat Kelembagaan, Pangarusutamaan Jender dan anak dalam Pembangunan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik. Sasarannya adalah (a). Meningkatkan Kualitas Hidup, Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan, Anak serta Keluarga, (b). Penguatan Kelembagaan, Pangarusutamaan Gender dan Anak.

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-5 : **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

⁸⁴ RPJMD Kabupaten Gresik, 2006 - 2010

17. Kebijakan Pengembangan Kapasitas Pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah.

Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan secara bersama-sama kemampuan sistem, lembaga dan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan. Sasarannya adalah (a) Meningkatkan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah pemerintahan daerah (b). Berkembangnya manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (c). Terwujudnya efektivitas sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

18. Kebijakan meningkatkan Manajemen Pembangunan Daerah, Tujuan kebijakan ini

adalah untuk mewujudkan semakin mantapnya manajemen pembangunan daerah dan keterpaduan program. Sasarannya adalah mencapai ketersediaan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan daerah serta terciptanya keterpaduan substansi dan kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-6 : **Mewujudkan Kondisi Daerah yang Aman, Tertib, dan Damai dengan Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia**, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

19. Kebijakan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Daerah. Tujuan kebijakan

ini adalah untuk mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. Sasarannya adalah (a). terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

meningkatnya jumlah dan mutu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

23. Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja secara berkelanjutan. Sasarannya adalah (a) Meningkatnya jumlah dan kesempatan kerja bagi masyarakat. (b). Meningkatnya kualifikasi SDM pencari kerja. (c). Meningkatnya perlindungan terhadap perusahaan dan tenaga kerja

24. Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keefektifan kebijakan tentang kependudukan hingga nyata berkonsekuensi pada dampak positif terbentuknya keluarga kecil berkualitas. Sasarannya adalah (a). menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas. (b). tertatanya administrasi kependudukan.

Dalam rangka mengimplementasikan misi pembangunan ke-8 : **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Titik Berat Ekonomi Kerakyatan**, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai berikut:

25. Mengembangkan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas seluruh entitas di bidang Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan

⁸⁵ RPJMD Kabupaten Gresik, 2006 - 2010

Ketenaga Listrikan dan Energi, (d). Meningkatnya pelayanan Pos dan Telekomunikasi, (e). Terwujudnya pengembangan Instrumen Pendukung Pembangunan Sumber Daya Buatan.

30. Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memulihkan kondisi lingkungan hidup yang menurun akibat pesatnya aktivitas pembangunan. Sasarannya adalah (a). Terwujudnya pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup, (b). Terwujudnya pengembangan Instrumen Pendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁶ RPJMD Kabupaten Gresik, 2006 - 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Robach Ma`sum lahir di desa yakni desa Dukun Anyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik bertepatan pada Tanggal 15 Ramadhan 1367 H atau 13 Juli 1948 M. dalam kehidupan Robach Ma`sum sebelum menjabat bupati, dia pernah juga sebagai Mahasiwa, Pendidik (Guru), dan Dosen.
2. Latar belakang Robach Ma`sum yang sebagai ulama sekaligus umara`, memiliki peran dalam masyarakat antara lain: *Pertama*, dalam bidang agama yakni sebagai tokoh agama, pendidik, mubaligh dan sekaligus pemimpin sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. *Kedua*, dalam bidang pendidikan, yakni Robach Ma`sum sebagai tokoh pergerakan dan intelektual muslim. *Ketiga*, dalam bidang politik, Robach Ma`sum sebagai pemimpin organisasi baik agama maupun kemasyarakatan dan menjadi Bupati Gresik.
3. Prioritas atau yang menjadi titik tekan pembangunan pada masa pemerintahan Robach Ma`sum yakni: pendidikan, kesehatan, dan agama-kebudayaan. *Pertama*; dalam bidang pendidikan, sebagai sebuah dimensi kehidupan masyarakat yang bersifat asasi. Kesan pendidikan mahal, pendidikan berpihak golongan kelas sosial

dan ekonomi, dan pendidikan yang sentralistik menjadikan upaya peningkatan sumber daya manusia pada masa sebelum reformasi terkesan sebagai omong kosong.

Kedua: bidang kesehatan, selain bidang pendidikan kesehatan juga merupakan kebutuhan yang mencakup hajat hidup masyarakat. Tersedianya layanan kesehatan yang baik sudah barang tentu harapan semua masyarakat.

Ketiga: bidang agama, agama juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang diwakili oleh Bupati memprioritaskan pembangunan di bidang ini. Pembangunan di bidang agama menurut KH Robach Ma`sum selaku Bupati Gresik mengatakan bahwa pembangunan di bidang agama sangat besar manfaatnya untuk menjadi landasan bagi pembangunan di bidang yang lain.

B. Saran

Berkenaan dengan materi skripsi ini, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Penelitian tentang peranan sebuah biografi merupakan hal yang penting. Selain untuk mengenang dan mementaskan kembali peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, penelitian ini juga merupakan gerak sejarah yang sebenarnya membuat kita lebih mengerti tentang arti sebuah lembaga pada waktu itu yang bisa dijadikan

kegiatan yang padat, sehingga diperlukan waktu yang tepat untuk mencari informasi maupun sumber data yang berhubungan dengan judul skripsi.

Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan-perbaikan baik dalam segi tulisan atau pembahasannya. Maka sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing dan penguji untuk skripsi ini.

Perwiranegara, Alamsjah Ratu. *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia*. Jakarta :

CV. Haji Mas Agung, 1987.

Sjamsuddin, Heliuss, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Subali, biografi KH. Robach Ma`sum “Dari Pesantren Ke Pendopo”. Gresik: Gresik: Ihyaul

Ulum Plubiser. 2005

Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: Pustaka LP3ES,1999.

Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang

Press, 2007.

Zulaicha, Lilik. *Metodologi Sejarah I*, (Laporan Penelitian), 2005.